

---

**PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN YANG TERBAIKAN:  
KAJIAN PERBATASAN KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN  
BENGKALIS – SELAT MALAKA**

Raden Imam Al Hafis

***Abstrak***

*Dengan bergulirnya pemerintahan dari yang awalnya sentralistik bertransformasi menjadi desentralisasi merupakan suatu keuntungan bagi daerah, terutama bagi kabupaten yang jauh dari jangkauan pemerintahan pusat. Harapan terbesar bagi daerah dengan adanya desentralisasi ini terutama bagi daerah perbatasan adalah pembangunan yang adil serta merata, terciptanya kesejahteraan tanpa ada keberpihakan pembangunan bagi setiap daerah yang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Namun harapan dan keinginan masyarakat tersebut tidak terjadi disebagian daerah, khususnya di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis yang notabennya adalah salah satu kabupaten terkaya di Indonesia yang menghasilkan minyak bumi dan sebagian besar Pendapatan Asli Daerahnya disumbangkan bagi pembangunan Negara Republik Indonesia. Untuk itu, kajian dalam tulisan ini membahas bagaimana hal tersebut terjadi di tengah negeri yang mempunyai kebijakan desentralisasi. Penyelesaian permasalahan daerah perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis akan bisa dipecahkan apabila: 1. Adanya “political will” dari pemerintah itu sendiri; 2. Mengenali dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi wilayah dan local wisdom yang ada; 3. Memahami sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat; 4. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat setempat; dan 5. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan serta perumusan strategi pengembangan yang sesuai dan lokalita serta berkoordinasi dan bersinergi dengan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pada akhirnya dapat menjadi sebab terhambat dan lambannya pembangunan.*

***Kata Kunci: Pembangunan, Desentralisasi, Daerah Perbatasan.***

**PENDAHULUAN**

Isu yang berkaitan dengan pembangunan akan selalu menjadi hal yang eksotis untuk dibahas bahkan seluruh lapisan masyarakat terutama yang hidup didalamnya baik kalangan muda, tua, akademisi, praktisi maupun lembaga sosial kemasyarakatan. Hal ini bukan suatu kesengajaan melainkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang disuatu areal tertentu bahkan di suatu negara. Dengan adanya keberhasilan pembangunan yang dilakukan, hal tersebut menjadi salah satu indikator dari berhasilnya pemerintah dalam menciptakan keadilan dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini tertuang dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang

---

pemerintahan daerah dalam pasal 67 huruf f “Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”<sup>1</sup>.

Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat, dengan demikian untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tentunya hal ini berkaitan dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*)<sup>2</sup>. Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan<sup>3</sup>.

Berkaca dengan kebijakan yang ada, seharusnya pembangunan yang berkeadilan sudah sangat semestinya dirasakan oleh semua daerah tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan adanya landasan hukum yang menyerahkan kebijakan pembangunan kepada masing-masing daerah karena daerah tersebutlah yang memahami teritorial daerahnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak daerah yang dengan adanya kebijakan tersebut bahkan pembangunannya tidak mengalami kemajuan bagi meningkatkan kesejahteraan seperti yang diimpi-impikan tersebut. Hal ini bisa kita lihat pada banyak daerah yang ada di Indonesia, terutama daerah yang teritorialnya berbatasan bahkan dengan negara lain cenderung terabaikan dari jaman tangan pemerintah untuk memajukan daerah tersebut. Karena Kajian daerah perbatasan terlalu luas yang ada di Indonesia, maka penulis memfokuskan pada kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sesuai dengan peraturan kepala badan nasional pengelola perbatasan nomor 1 tahun 2015, tentang rencana induk pengelolaan perbatasan negara tahun 2015 – 2019 kabupaten bengkalis terdapat 5 (lima) kecamatan yang termasuk lokasi prioritas (lokpri) yaitu kecamatan bengkalis, bantan, bukit batu, rupert dan rupert utara<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 67 huruf f. Hal 43.

<sup>2</sup> Kartasmita G, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Cides, Jakarta, hal 6.

<sup>3</sup> Riyadi & Bratakusumah Supriady, Deddy. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>4</sup> Pidato Bupati Bengkalis, 2017. Rapat Penyusunan RDTR Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Negara Di Kecamatan Rupert

---

Memabahas Provinsi Riau orang tidak asing lagi dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu daerah penyumbang hasil alam terbesar di Indoensia di bidang Minyak Bumi. Kabupaten yang memproduksi minyak bumi tersebut yaitu kabupaten Bengkalis. Kabuapten Bengkalis mempunyai salah satu kecamatan yang daeahnya berbatasan dengan Negara Malaysia bahkan jarak tempuhnya hanya 30 Menit ke Malaysia (selat malaka) sedangkan ke Kabupaten harus menempuh waktu 3 – 4 jam, sedangkan untuk menuju Ibukota Provinsi membutuhkan waktu 7 – 10 jam perjalanan darat.

Kepemilikan tanah yang ada disepanjang pantainya berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat yang ada, sudah banyak dibeli oleh pengusaha dan warga negara asing seperti dari singapura dan malaysia. Hal ini tentunya mempunyai dampak pembangunan jangka panjang dan bisa mengancam keberadaan mereka sebagai penduduk asli suatu waktu akan tergusur apabila mereka yang telah membeli melakukan pembangunan dan pengembangan usaha.

Selain itu infrastruktur yang ada tidak bisa dikatakan adanya peningkatan baik infrastruktur jalan, bangunan. Kontradiksi dengan julukan sebagai salah satu kabupaten terkaya di Indonesia. Ketimpangan pembangunan sangat terlihat, walau daerah tersebut bukan sebagai salah satu penghasil kekayaan alam yang selama ini memberikan sumbangsih bagi pembangunan Indonesia bahkan Kabupatennya, namun daerah ini selau menjadi ikon destinasi alam yang indah di Kabupaten tersebut. Mirisnya, selalu menjadi ikon wisata lautnya namun akses menuju daerah tersebut sangat jauh dari apa yang di promosikan selama ini. Ketimpangan pembangunan ini bukan tidak mungkin menjadikan ketimpangan sosial bagi masyarakat yang ada didaerah tersebut.

## PEMBAHASAN

Secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara *an increasing attainment of one's own cultural value*<sup>5</sup>. Ini yang disebut sebagai cita-cita bangsa. Maka dari itu, jika mengacu pada konsep kenegaraan kita, tujuan akhir dari pembangunan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam sila terakhir pancasila.

---

<sup>5</sup> Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. Pembangunan, Dilema, dan Tantangan. Pustaka Pelajar, Jakarta. Hal. 1

---

Dengan demikian, pembangunan sangat berkaitan dengan nilai, dan acap kali bersifat transendental, suatu gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah ideologi (*the ideology of developmentalisme*). Oleh sebab itu, para perumus kebijakan, perencana pembangunan serta para pakar yang terlibat di dalamnya akan selalu dihadapkan dengan pilihan nilai (*value choice*), mulai dari pilihan epistemologi-ontologi sebagai kerangka filosofisnya, tingkat strategis, program, atau proyek. Pokok pembangunan yang ada tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Oleh sebab itu, pembangunan membutuhkan proses dan tahapan yang tetrukur. Tahapan ini harus menyentuh berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang kesejahteraan sosial dan bidang keadilan sosial<sup>6</sup>.

Secara umum kita bisa memberikan makna pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) oleh pembuat kebijakan dan para birokrat perencanaan pembangunan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembangunan dan mampu membuat perubahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan dalam masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Tolak ukur bagi pembangunan tidak hanya pendapatan per kapita masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya pengangguran dan kemiskinan<sup>7</sup>.

Mengacu kepada *grand design* pengelolaan perbatasan Republik Indonesia, pengelolaan perbatasan dilakukan melalui tiga pendekatan yang terdiri dari;

1. Pertama, pendekatan kesejahteraan yakni pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan, diarahkan berbasis pada komoditas unggulan masing-masing wilayah perbatasan dan sekitarnya sesuai karakteristik dan potensi unggulannya. Sehingga daerah perbatasan akan menjadi gerbang ekonomi dan perdagangan Indonesia.
2. Kedua, pendekatan keamanan, yang memandang daerah perbatasan sebagai kawasan strategis dan dalam aspek keutuhan NKRI;

---

<sup>6</sup> Kartono, T Drajat & Nurcholis, H. Konsep dan Teori Pembangunan, ut.ac.id. Hal. 1.5

<sup>7</sup> Ibid

3. Ketiga, pendekatan lingkungan, yakni dalam pengelolaan perbatasan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan<sup>8</sup>.

Dalam konteks Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkulu, ketiga pendekatan ini sangat relevan untuk didiskusikan dalam forum yang lebih luas karena dinamika yang terjadi menunjukkan kecenderungan perkembangan daerah perbatasan yang *sporadic* tanpa dukungan rencana komprehensif sehingga *effectnya* memberikan ketidakpastian pada masa depan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, dukungan yang maksimal pihak provinsi dan badan nasional pengelola perbatasan untuk memfasilitasi program-program strategis di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkulu khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, jembatan, akses pendidikan dan akses kesehatan di wilayah perbatasan guna mendapatkan perhatian yang khusus dalam APBD Provinsi dan APBN yang lebih intensif. Sehingga tujuan untuk mengembangkan kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu dan komprehensif dapat terlaksana.

### **Permasalahan dan Dampak Ketimpangan Pembangunan Daerah Perbatasan**

Beberapa permasalahan secara umum dijumpai di daerah perbatasan diantaranya: 1) sering timbul masalah dalam hal kebijakan yang harus diterapkan; 2) terdapat kecenderungan tumbuh lebih lambat; 3) benturan dua kepentingan antara dua wilayah; dan 4) belum ada kesatuan dalam perencanaan wilayah perbatasan itu sendiri yang menimbulkan ketidakserasian persepsi dan aspirasi pembangunan yang pada akhirnya akan berdampak pada ketidakserasian program-program pembangunan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah di daerah perbatasan tersebut<sup>9</sup>.

Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta kurang pengawasan dan minimnya penyediaan sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan, merupakan permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir semua kawasan perbatasan wilayah negara Indonesia termasuk kabupaten Bengkulu, sehingga menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses

---

<sup>8</sup> Pidato Bupati Bengkulu, 2017. Rapat Penyusunan RDTR Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Negara Di Kecamatan Rupa. Hal.12

<sup>9</sup> Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *SMARTek*, 8(1).

---

kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relative lebih maju.

Keteringgalan Pembangunan kewilayahan terkait erat dengan sistem ekonomi-politik sebuah negara. Hal ini juga disepakati bahwa dengan kebijaksanaan pusat akan terjadi sebuah keputusan untuk mengembangkan wilayah mana saja, dan akan “mengorbankan” wilayah yang lain<sup>10</sup>. Dimasa Orde Baru, jika mengembangkan sebuah wilayah harus menganut konsep kutub pertumbuhan. Konsep ini dilakukan dengan jalan mengalokasikan investasi yang tinggi sektor industri di pusat kota besar. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi mampu menyebar dan membangkitkan pembangunan wilayah disekitarnya (*spread effect and trickle down effect*). Asumsinya, barang-barang yang dihasilkan di ekspor keluar dan pusat metropolitan untuk menjadi “mesin pembangun” (*engine of development*)<sup>11</sup>. Sayangnya pembangunan kawasan-kawasan khusus tersebut tidak disertai strategi yang tepat, dan sering hanya bernuansa politis, terutama terkait dengan isu desentralisasi saat ini<sup>12</sup>.

Jika dilihat berkaitan dengan permasalahan yang ada di Kecamatan Rupert Utara infrastruktur dasar jalan, jembatan, akses pendidikan dan akses kesehatan yang sangat sulit di dapati oleh masyarakat yang ada. Ketika penulis berkunjung ke Rupert Utara dalam rangka melakukan pengabdian kepada masyarakat permasalahan diatas benar-benar dirasakan terutama akses jalannya yang rusak parah, jembatan yang tidak memadai, akses kesehatan dan pendidikan yang sulit. Bahkan mereka lebih senang melakukan kegiatan perekonomian di Negara Malaysia dibandingkan ke Kota Dumai maupun Kabupatennya sendiri. Bahkan bahasa, produk makanan, elektronik, sepeda motor dan barang kebutuhan lainnya lebih identik ke malaysia dari pada barang dan bahasa Indonesia.

Berbagai dampak yang ditimbulkan akibat dari ketimpangan pembangunan yang dilakukan, terutama apabila mengabaikan daerah perbatasan. Karena selain faktor alam, secara psikologis masyarakat di daerah perbatasan membutuhkan pendekatan yang berbeda terutama dalam memahami eksistensi mereka dalam pranata sosial yang menjadi

---

<sup>10</sup> Hill, Hal, 1998. “The Challenge of Regional Development in Indonesia” Australian Journal of International Affairs 52, No.1

<sup>11</sup> Douglass, Mike.1998. “Urban and Regional Policy After the Era of Native Globalism”. Paper presented at the Global Forum on Regional Policy United Nations Center for Regional Development. Nagoya, December 1-4

<sup>12</sup>Wilonoyudho, S. (2009, December). Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. In *Forum Geografi* (Vol. 23, No. 2, pp. 167-180).

bagian dari republik ini. Tidak jarang pemahaman masyarakat kita di perbatasan, khususnya di Kabupaten Bengkalis kecamatan Rupert Utara ini tentang negara tetangga jauh lebih baik dari pada pengetahuan tentang negeri sendiri dan ketergantungan secara ekonomi jauh lebih besar kepada ringgit dari pada rupiah.

Selain itu perkembangan perekonomian sangat lemah bahkan rata-rata penduduk yang ada di daerah perbatasan tersebut sering melakukan Emigrasi. Motivasi utama orang melakukan perpindahan dari daerahnya ke perkotaan/negara lain adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antardaerah<sup>13</sup>. Selain itu akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat setempat, kemudahan mendapatkan pekerjaan di negara atau tempat lain. sedangkan di Indonesia sendiri saat ini malah mendatangkan tenaga kerja asing disaat masyarakat membutuhkan pekerjaan dan negara tidak mampu mengakomodasikan kebutuhan rakyat tersebut.

Selain hal diatas, maraknya penyeludupan narkoba juga menjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh daerah perbatasan tersebut karen mudahnya akses yang dilakukan baik dari malaysia melalui selat malaka dan daerah perbatasan seperti Rupert utara tersebut banyak pelabuhan rakyat atau “pelabuhan tikus” istilah bagi masyarakat disekitar. Sehingga saat ini menjadi perhatian khusus bagi kabupaten bengkalis dalam menangani maraknya peredaran narkoba di daerah tersebut.

Penyelesaian permasalahan diatas, terutama daerah perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis yang dipaparkan tersebut akan bisa dipecahkan dan masyarakat dapat merasakan keadilan pembangunan yang merata dan pemerintah mampu membuat kesejahteraan masyarakat meningkat apabila:

1. Adanya “*political will*” dari pemerintah itu sendiri, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta lembaga sosial masyarakat dan pihak swasta. Karena serangan bagi suatu bangsa tidak lagi dengan perang fisik tetapi serangan narkoba, ada *human trafficking, illegal fishing, illegal logging yang itu akan dilakukan melalui daerah perbatasan;*
2. *Mengenali dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi wilayah dan local wisdom yang ada, sehingga perkembangan dan pengembangan yang dilakukan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarkat setempat;*

<sup>13</sup> Mantra, I.B. 1992. Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa ke Kota di Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.

3. Memahami sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat;
4. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat setempat; dan
5. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan serta perumusan strategi pengembangan yang sesuai dan lokalita serta berkoordinasi dan bersinergi dengan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pada akhirnya dapat menjadi sebab terhambat dan lambannya pembangunan.

Pengembangan daerah perbatasan, khususnya di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis untuk bidang perekonomian masyarakat lebih cenderung bergerak di perikanan dan perkebunan karet, selain itu objek wisata pantai dan budaya yang dimiliki oleh Kecamatan Rupert Utara juga menjadi salah satu ikon dan daya tarik bagi daerah tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan secara merata dan berkeadilan perlu kiranya dilkakukan penelitian lebih mendalam dan terfokus terutama perbatasan di kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis ini. Penulis menyadari bahwa di Indonesia masih sangat banyak daerah perbatasan yang pembangunannya masih belum terlaksana secara maksimal, sehingga dengan adanya penelitian secara mendalam tersebut akan ditemukan jalan pemecahan yang konkrit bagi perkembangan wilayah perbatasan dan kesejahteraan serta keadilan sosial bisa dicicipi bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Beberapa hal yang kiranya perlu dibahas secara mendalam dan holistik diantaranya:

1. Menegani *political will* pemerintah selama ini berkaitan dengan pembangunan dan penegmbangan yang dilakukan.
2. *Mengenal dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi wilayah dan local wisdom yang ada, sehingga perkembangan dan pengembangan yang dilakukan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarkat setempat;*
3. Memahami sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat;
4. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat setempat; dan

- 
5. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan serta perumusan strategi pengembangan yang sesuai dan lokalita serta berkoordinasi dan bersinergi dengan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pada akhirnya dapat menjadi sebab terhambat dan lambannya pembangunan.

Selian hal diatas, dibutuhkan dukungan dan peran dari Perguruan Tinggi, LSM, lembaga *research*, pihak swasta, lembaga keuangan daerah dan nasional serta kemampuan aparatur daerah yang kompeten serta memiliki visioner yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *SMARTek*, 8(1).
- Douglass, Mike. 1998. "Urban and Regional Policy After the Era of Native Globalism". Paper presented at the Global Forum on Regional Policy United Nations Center for Regional Development. Nagoya, December 1-4
- Hill, Hal, 1998. "The Challenge of Regional Development in Indonesia" *Australian Journal of International Affairs* 52, No.1
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Cides.
- Mantra, I.B. 1992. *Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa ke Kota di Indonesia*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Pidato Bupati Bengkalis, 2017. *Rapat Penyusunan RDTR Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Negara Di Kecamatan Rupa*
- Purnomo, D. (2009). *Fenomena migrasi tenaga kerja dan perannya bagi pembangunan daerah asal: studi empiris di kabupaten wonogiri*.
- Riyadi & Bratakusumah Supriady, Deddy. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wilsonoyudho, S. (2009, December). *Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan*. In *Forum Geografi* (Vol. 23, No. 2, pp. 167-180).